

Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Penguatan Kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Yusep Ginanjar dan Kristyono Ratmoko
Jurusan Hubungan Internasional FISIP
Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl. Terusan Sudirman, Cimahi
Yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id

Abstrak— Dewasa ini regional ASEAN (Associations Of South East Asian Nation) sedang disibukan dengan wacana yang semakin membesar yaitu mengenai Masyarakat Ekonomi Asean. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomu ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Semua yang menjadi anggota ASEAN yang didalamnya termasuk Indonesia ikut menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam indonesia tapi pada dasarnya MEA itu sama saja dengan AEC atau ASEAN Economic Community. KTT yang dilakukan pada tahun 1997 di kuala lumpur pada akhirnya memunculkan ide untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang didasari oleh keinginan para pemimpin ASEAN agar menjadi suatu kawasan regional yang lebih sejahtera, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020). Hal tersebut menciptakan persaingan ekonomi tingkat bawah karena menuntut peran sektor ekonomi ril seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah mentransformasikan diri menjadi lebih siap dan lebih modern agar bisa bersaing. Menjadi hal yang sangat krusial untuk dapat meningkatkan kapasitas UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat dalam menghadapi MEA karena ini terkait dengan kesiapan UMKM tersebut agar tidak kalah dalam bersaing. Perumusan dalam penelitian ini menitikberatkan pada sejauhmana pemerintah Kabupaten Bandung barat mempersiapkan peningkatan kapasitas UMKM, maka Untuk dapat menjadikan penelitian ini sangat relevan maka digunakan metode analitis kualitatif agar dapat lebih menggali persoalan. Adapun targetan dalam penelitian ini adalah memahami persoalan UMKM dalam menghadapi MEA dan memberikan kontribusi solusi baik pada pemerintah maupun UMKM itu sendiri.

Kata kunci— Pemda, Bandung Barat, Masyarakat Ekonomi ASEAN, UKM

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini sudah diimplemetasikan secara bertahap mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA terwujud dari keinginan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian Internasional. Semua perwakilan negara dan yang memimpin ASEAN melalui lobi-lobi politik telah mendapatkan kesepakatan untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Harapan besar dengan adanya MEA yaitu adanya arus masuk dan keluar secara bebas jasa, barang, dan tenaga kerja yang sudah terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Dalam penerapannya MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas, yaitu perikanan, e-travel, e-ASEAN, automotif, logistik, industri berbasis kayu, industri berbasis karet, furnitur, makanan dan minuman, tekstil, serta kesehatan.

Tentu bagi dunia usaha di Indonesia khususnya UMKM dengan adanya MEA 2015 akan memunculkan beberapa rintangan dan peluang yang tidak hanya dari sisi intern dari dalam negeri akan tetapi lebih dari itu yaitu bersaing dengan ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Adanya persaingan yang sangat luar biasa, pasti berdampak pada harga yang bersaing dan variatif baik sector industri yang besar maupun UMKM dalam berbagai sektor barang dan jasa yang kurang lebih sama karakteristiknya. Tentu dunia usaha dan pemerintah harus bisa menyadari bahwa UMKM merupakan kelompok usaha yang sangat dominan dari segi jumlah dalam perekonomian, maka pencapaian kesuksesan MEA sudah pasti dipengaruhi oleh kesiapan UMKM.

UMKM di Indonesia sudah terbukti sangat mampu bertahan dan melawan instabilitas ekonomi bahkan menjadi penyokong perekonomian pada saat terjadi krisis

keuangan tahun 1997 serta krisis yang terjadi secara global di tahun 2008. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sekitar 55 juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%.

Setelah melakukan observasi awal maka dapat terlihat bahwa di Kabupaten Bandung Barat, UMKM sampai dengan saat ini selalu mengalami segala macam persoalan dan masalah baik yang sifatnya berulang dan sering terjadi sampai dari segi tingkatan yang dimulai dari persoalan tingkat rendah sampai dengan yang tinggi. Pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang muncul baik dari segi sektor maupun wilayah akan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun ada sejumlah permasalahan yang umum dihadapi oleh semua UMKM. Meskipun telah terjadi perkembangan UMKM yang secara trend meningkat tersebut ternyata belum diiringi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan yang hampir merata di UMKM yaitu rendahnya produktivitas. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kelemahan secara internal di tubuh UMKM secara umum yaitu: belum terpenuhinya standar kualitas SDM UMKM dalam persoalan manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan persoalan eksternal yang menghadang UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi yang diakibatkan oleh iklim usaha yang kurang kondusif serta susahnya bahan baku. Selain itu mengenai perolehan legalitas secara hukum juga menjadi hal yang masih sulit untuk didapatkan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten yang masih baru berdiri maka tentu sangat memerlukan pembinaan UKM yang sangat masif, terukur dan terencana. Sampai dengan saat ini, terlihat masih belum melakukan akselerasi penguatan kapasitas UMKM menghadapi MEA. Setelah melihat permasalahan diatas bahwa UMKM harus menjadi sektor yang memimpin dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat namun belum mendapatkan dukungan dan perlindungan yang berarti dalam menjalankan usahanya maka, maka perlu dilakukan kajian mendalam guna menjabarkan bagaimana peran penting UMKM dan daya dukung pemerintah dalam membangun sector UMKM untuk persiapan menghadapi MEA secara menyeluruh.

II. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Adapun Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu : "Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi

mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada".¹

B. Teknik Pengumpulan, Analisis, dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, observasi secara langsung, dan wawancara pada para informan yang dianggap kompeten di bidangnya. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan memverifikasi data. Adapun teknik keabsahan data yang dilakukan adalah kredibilitas (validitas internal), Transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).²

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Gambaran Umum U

Banyak kawasan di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi cukup tinggi, terutama industri manufaktur, perdagangan, jasa, hotel, dan restoran. Terkonsentrasi di Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar dan Lembang. Sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan produk unggulan dan merupakan sentra produksi pemasok utama skala regional Jawa Barat dan Jakarta. Kurangnya peran serta swasta, keseriusan Pemerintah dan BUMN mengakibatkan beberapa potensi alam termasuk yang dikola oleh Perum Perhutani sulit untuk dikembangkan. Beberapa kelemahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat di sektor perekonomian dan investasi adalah:

- 1) Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
- 2) Kurangnya promosi potensi investasi daerah, terutama di bidang agroindustri dan industri manufaktur;
- 3) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
- 4) Belum berjalannya peran kelembagaan ekonomi desa; Hanya beberapa koperasi di tingkat kecamatan yang masih berjalan, sehingga berkembang sistem ijon oleh para tengkulak; 54,57% penduduk Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang bekerja mempunyai upah/gaji < Rp. 500.000,- per-bulan;
- 5) Meskipun industri memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, namun secara proporsional belum mampu menyerap tenaga kerja sebesar sektor pertanian; Ketidak jelasan kelangsungan sektor galian dan pertambangan; Pertanian dan peternakan di Cisarua dan Parongpong belum memberikan nilai tambah yang tinggi;
- 6) Kawasan industri tidak berbasis pada sumberdaya lokal;
- 7) Aktivitas pertanian di Lembang dan Cibodas tidak mendorong serapan tenaga kerja; Keterkaitan dan efek ganda (multiplier effect) sektor industri terhadap sektor-sektor lainnya masih relatif rendah; Buruknya sarana jalan dan kemacetan sebagai urat nadi

perekonomian menjadi salah satu hambatan dan tingginya biaya produksi.

B. Kondisi dan Penguatan Kapasitas UMKM

Kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kabupaten Bandung Barat sangat beragam. Ada persoalan yang secara umum dialami oleh pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat. Persoalan yang umum tersebut diantaranya adalah seperti keterbatasan modal awal atau investasi, kekurangan pasokan bahan baku yang mempunyai kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, terbatasnya peralatan yang berteknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi), informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk manajemen dan teknisi distribusi).

1) Pemasaran

Tekanan saingan dari produk-produk yang datang dari luar negeri maupun dari domestik membuat para pelaku usaha UMKM banyak menemukan kebuntuan dalam penetrasi pasar. Hal ini tentu berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah menganggap menurunnya daya beli masyarakat merupakan implikasi dari pelemahan ekonomi selama beberapa waktu belakangan akibat menurunnya harga komoditas khususnya pertambangan³. Mahalnya bahan baku juga menjadi salah satu faktor susahnyamasarkan produk karena secara otomatis barang pun menjadi mahal dan masyarakat berpikir ulang untuk membeli. Hal lain adalah belum terciptanya jaringan relasi yang berkaitan dengan pemasaran.

2) Keterbatasan Finansial dan Akses Bank

Jenis kepemilikan modal dalam UMKM di kabupaten Bandung Barat yaitu kepemilikan pribadi. Masih sangat jarang pihak perbankan yang bisa memberikan modal secara besar-besaran untuk UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Alasan dari perbankan untuk memberikan modal yang signifikan adalah belum terlihat unsur bisnis yang mumpuni untuk dapat mempertanggungjawabkan pengembalian uang yang dipinjam.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam persoalan entrepreneurship dan manajerial usaha. banyak UMKM bangkrut karena belum mempunyai jiwa pengusaha yang tanggung dan tidak memiliki manajerial usaha yang baik.

C. Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penguatan Kapasitas UMKM

Dari data gambaran umum bandung barat yang dihasilkan bahwa ada banyak UMKM yang terdaftar di pemerintah kabupaten bandung barat. Akan tetapi dalam kenyataannya yang sangat aktif melakukan usaha hanya sepertiganya. Adapun perencanaan strategis pemerintah

kabupaten bandung barat berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul di atas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas dan standar produk

Agar dapat memperbesar peluang dan potensi pasar di kawasan ASEAN dan pasar global, maka produk unggulan setiap UMKM yang ada di kabupaten Bandung Barat haruslah bisa memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh negara ASEAN dan negara tujuan lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka UMKM di kabupaten Bandung Barat akan mulai difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat perihal kebutuhan kualitas dan standar produk yang dipersyaratkan oleh pasar ASEAN maupun di luar ASEAN. Peranan dukungan teknologi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas serta pengenalan desain kepada para pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan pasar ASEAN akan segera dilakukan.

2) Meningkatkan Akses Permodalan

Pemerintah Kabupaten Bandung barat telah mencanangkan mengenai bantuan akses UMKM pada pihak perbankan. Adapun wujud konkrit yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait Lembaga Keuangan Mikro yang bisa memberikan akses permodalan terhadap UMKM.

3) Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM

Untuk menekan angka pengangguran, Pemkab Bandung Barat gencar menggelar berbagai pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat. Tak hanya itu, Pemkab juga memberikan modal usaha bagi mereka.⁴ Di Kabupaten Bandung Saat ini, ada sekitar 20.800 UMKM dan baru ada sekitar 6.800 UMKM yang mendapatkan pembinaan⁵. Menurut Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, Wewen Surwenda Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bandung Barat terus melakukan perbaikan, pembinaan serta pelatihan bagi para pemilik usaha kecil dan menengah. Selain sebuah program dari dinas UMKM kabupaten Bandung Barat pelatihan serta pembinaan diberikan agar para pelaku usaha mampu bersaing dengan yang lainnya.

4) Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif.

Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya⁶. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, perusahaan mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Oleh karena itu pemerintah kabupaten bandung barat juga melihat bahwa perlu adanya transfer teknologi agar pelaku UMKM bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu contoh yang dijadikan sebagai transfer

teknologi adalah mengenai penggunaan media elektronik seperti komputer dan peranti lunak telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi, promosi, dan riset. Ketiga hal tersebut bisa dilakukan melalui internet. Jadi UMKM di Bandung Barat sudah mulai diperkenalkan bagaimana menggunakan teknologi untuk mengenalkan produknya. Hal tersebut memang sudah mulai berjalan, akan tetapi akan dilakukan peningkatan-peningkatan dan inovasi lainnya sesuai kebutuhan dimasa depan.

5) Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di dalam dan luar negeri

Tidak hanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi mengenai target pasar yang perlu diperhatikan, ternyata UMKM juga harus memiliki kemudahan dan akselerasi dalam mempromosikan produk dagangannya kepada calon konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Oleh karena itu dalam menghadapi MEA, pemerintah Kabupaten Bandung Barat lebih memaksimalkan untuk membantu mengenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat dengan memberikan akses informasi mengenai pangsa pasar dan pameran di negara-negara ASEAN dan juga pameran-pameran yang ada di dalam negeri.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini ditemukan berbagai kendala terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persoalan yang menonjol yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Bandung Barat adalah Kesulitan Pemasaran, Keterbatasan Finansial, Keterbatasan SDM yang mumpuni dalam manajerial. Oleh karenanya pemerintah kabupaten Bandung Barat memiliki perencanaan dan strategi yang dilakukan guna

meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Kab. Bandung Barat untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Meningkatkan kualitas dan standar produk, Meningkatkan akses permodalan, Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM, Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UMKM inovatif, Memfasilitasi UMKM berkaitan akses informasi dan promosi di dalam dan luar negeri. Perencanaan tersebut sudah berjalan cukup bagus namun masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi strategi. Namun ada kendala lain yang muncul yaitu belum bisa mengukur prosentase keberhasilan sehingga memerlukan penajaman analisa dari implementasi perencanaan tersebut melalui penelitian lanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih pada para pemangku jabatan baik dari pihak rektorat dan LPPM unjani, fakultas FISIP unjani, dan jurusan Hubungan Internasional UNJANI atas izin dan dukungannya dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 26
- [2] Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [3] Laporan. Kajian Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Bandung Barat. Pemda KBB. 2015.
- [4] <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/07/29/336267/> pemkab-bandung-barat-gencar-berikan-pelatihan-wirausaha diakses pada 18 Desember
- [5] <http://jabarekspres.com/2017/pemda-kbb-berikan-pelatihan-pelaku-ukm/>. Diakses pada 18 Desember 2017
- [6] McKeown, Patrick G., 2001. Information Technology and The Networked Economy, Harcourt: Orlando